

	News Title : Bappebti Dorong Peningkatan Capaian Kinerja Perdagangan Berjangka Komoditi	
	Media Name : Asumsi.co	Journalist : -
	Publish Date : 01 November 2023	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 1,500,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Bisnis	Topic : Kinerja Bappebti

Bappebti Dorong Peningkatan Capaian Kinerja Perdagangan Berjangka Komoditi



Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menyampaikan perkembangan capaian kinerja Bappebti di sela persiapan alih raga Kepala Bappebti. Menurutnya, Bappebti terus berupaya memperkuat perdagangan dan ekonomi digital di Indonesia melalui pengembangan Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistemresi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).

"Berbagai kebijakan strategis dibuat untuk memberikan ruang bagi pengembangan usaha dan inovasi dalam ketiga industri tersebut, serta memberikan kepastian berusaha dan perlindungan hukum bagi masyarakat," terang Didid.

Di bidang aset kripto, sampai dengan Oktober 2023, Bappebti telah mengeluarkan izin berupa tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto kepada 22 perusahaan untuk dapat melakukan transaksi perdagangan di pasar fisik aset kripto.

"Perdagangan aset kripto dapat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat, menciptakan, dan mendorong upaya pengembangan ekonomi digital Indonesia pada 2030," ujar Didid.

Seiring dengan penguatan Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK), kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan sektor inovasi teknologi, keuangan digital dan aset kripto menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, pengawasan atas aset kripto akan beralih dari Bappebti ke OJK.

Pada 17 Juli 2023, Bappebti juga telah menerbitkan persetujuan Bursa Berjangka Aset Kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara, Lembaga Kliring Berjangka Aset Kripto kepada PT Kliring Berjangka Indonesia, serta Pengelola Tempat Penampungan Aset Kripto kepada PT Tenet Depository Indonesia.

Didid menambahkan, adanya kelengkapan perdagangan aset kripto memberikan dampak positif terhadap kesehatan jumlah pelangan aset kripto. Hal ini menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat dalam memilih aset kripto sebagai alternatif investasi. Jumlah pelangan aset kripto hingga September 2023 mencapai 17,01 juta pelanggan dengan nilai transaksi sebesar Rp4,41 triliun.

Didid menegaskan, Bappebti terus berkomitmen memperkuat pengembangan perdagangan aset kripto di Indonesia melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan, asosiasi, dan instansi terkait.

"Penguatan literasi kepada masyarakat juga dilakukan dengan menjangkau media massa agar masyarakat memperoleh informasi yang benar tentang aset kripto," imbuhnya.

Kebijakan Perdagangan CPO melalui Bursa Berjangka

Pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola perdagangan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia melalui diterbitkannya Peraturan Bappebti (Perbap) No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka yang mengatur perdagangan CPO di Bursa Berjangka lokal secara voluntary.

"Kebijakan perdagangan CPO harus cepat beradaptasi dengan kondisi pasar yang dinamis. Kebijakan ini juga harus dipantau mendukung Indonesia menjadi barometer harga CPO dunia. Kita harus mengoptimalkan nilai ekonomi dan perdagangan CPO bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia," jelas Didid.

Didid menekankan manfaat kebijakan perdagangan CPO melalui bursa berjangka, yaitu terbentuknya harga acuan (price reference) CPO yang transparan, akurat, dan real time. Saat ini, perdagangan CPO di Indonesia masih mengacu pada harga referensi dari luar negeri sehingga menjadi tidak transparan, tidak real time, dan sering menimbulkan under pricing.

Harga acuan ini dari sisi hulu diharapkan dapat memperbaiki harga tawaran jual wajar (TJW) di tingkat petani yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan harga acuan keekonomian yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secara lebih akurat. Sedangkan, dari sisi hilir, terbentuknya harga acuan CPO dari transaksi di Bursa Berjangka CPO Indonesia ini juga dapat digunakan untuk penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) lebih jelas dan mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak.

Meskipun transaksi CPO di Bursa Berjangka bersifat sukarela, pemerintah optimis pelaku usaha akan berpartisipasi dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Pemerintah juga telah menetapkan Bursa CPO Indonesia yang akan mengatur serta menyelenggarakan perdagangan CPO melalui bursa berjangka.

"Meskipun bersifat sukarela, namun kami yakin seluruh pelaku usaha bersedia berpartisipasi dalam upaya menetapkan market CPO di Indonesia. Kami juga mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pengusaha pabrik kelapa sawit ikut serta dalam Bursa CPO Indonesia ini. Hal ini karena perdagangan di bursa akan memampukan penjual dan pembeli pada tingkat yang sama. Selain itu, juga memiliki keuntungan tersendiri karena perdagangan melalui bursa akan mempermudah penjual dengan pembeli," kata Didid.

Didid menyampaikan, pada 9 Oktober 2023, Bappebti telah menerbitkan persetujuan Bursa CPO kepada PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BP/PO/2023. Menurutnya, saat ini sudah bergabung 70 pelaku usaha CPO yang siap untuk berdagang melalui Bursa CPO Indonesia.

"Ini menjadi langkah awal yang baik. Bursa ini tidak mulai dari nol. Hal ini juga menunjukkan bahwa sudah ada keinginan kuat dari pelaku usaha untuk mewujudkan perdagangan CPO lebih adil dan transparan," jelasnya.

Didid mengatakan, bursa berjangka beroperasi lebih cepat dari target waktu yang semula dijadwalkan pada 23 Oktober 2023. Selanjutnya, Bappebti menargetkan pada triwulan pertama 2024 harga acuan CPO sudah terbentuk.

Perkembangan Sistem Perdagangan Alternatif

Saat ini, transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) masih mendominasi transaksi PFK di Indonesia. Namun, proporsinya semakin berkurang. Artinya, transaksi multilateral mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini dapat dilihat dalam enam tahun terakhir yang menunjukkan volume transaksi multilateral telah mengalami kenaikan dari 16,09 persen pada 2019 menjadi 27,26 persen pada 2023.

Hal tersebut menjadi perhatian Bappebti untuk terus berupaya serta bermitra dengan pelaku usaha, Kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan transaksi multilateral melalui perdagangan komoditas strategis unggulan Indonesia melalui bursa berjangka seperti CPO, kopi, kakao, karet, dan lain-lain. Bappebti juga telah melakukan perbaikan dalam tata kelola SPA antara lain melalui peninjauan Peta Nomor 6 Tahun 2023 yang salah satunya mengharuskan pelaku usaha melakukan peningkatan tingkatan keuangan terkait dengan modal, sertifikasi ISO 27001, penguasaan Know Your Customer (KYC) melalui sistem pengenal wajah dan suara.

Penguasaan Pedagang Bappebti

Bappebti berkomitmen mempercepat penyelesaian pedagang masyarakat terkait PFK. Dari 23 laporan masyarakat kepada Ombudsman, delapan laporan sudah selesai dan 15 lainnya masih dalam proses (pemeriksaan, penyidikan, dan evaluasi). Selain itu, Bappebti juga tengah gencar melakukan penguatan literasi kepada masyarakat terkait investasi di bidang PFK untuk memberihkan efek investasi tidak beresit dalam rangka mengantisipasi kerugian masyarakat dan mengurangi jumlah pedagang.

Bappebti telah memblokir 1.726 domain situs web entitas ilegal di PFK pada Januari s.d Oktober 2023 dengan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika. Langkah tersebut merupakan upaya strategis Bappebti dalam mencegah potensi kerugian di masyarakat akibat kegiatan ilegal bidang PFK.

"Bappebti terus melakukan pengawasan dan pengamatan secara rutin dan berkelanjutan terhadap kegiatan di bidang PFK ilegal. Selain berupaya merugikan masyarakat, kegiatan ilegal dapat merusak citra industri PFK dan menimbulkan kerugian dunia usaha yang tidak sehat. Jadi, diperlukan langkah untuk meminimalisasi promosi, iklan, dan pemenuhan entitas ilegal di bidang PFK," tegas Didid.

SRG Dibutuhkan untuk Ekspor

Bappebti berkomitmen untuk mendorong implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan kecilnya ekspor Indonesia, di samping menjamin ketersediaan pasokan komoditas, khususnya bahan pangan dalam negeri.

"Saat ini adalah momentum yang baik untuk mendorong kinerja ekspor Indonesia. Integrasi SRG dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak. Petani dan pelaku usaha umum, pengelola gudang umum, dan perbankan juga umum. Dengan demikian, integrasi tersebut dapat mendorong kinerja perdagangan di Indonesia," tegas Didid.

Didid mengungkapkan, beberapa komoditas berhasil diekspor melalui gudang SRG, seperti ikan dari gudang SRG Bona Bali dan Probolinggo ke Korea dan Australia, beras organik dari gudang SRG Wintagiri ke Amerika Serikat, Prancis, Singapore dan Malaysia bagi dari gudang SRG Aceh Tengah dan Subang ke Amerika Serikat, Mesir dan Lebanon, dan rumput laut dari gudang SRG Makasar ke Jepang, Italia, Tiongkok, Rusia, dan Jerman.

SRG adalah sistem penyimpanan komoditas di gudang SRG yang memenuhi petani dan pelaku usaha dalam melakukan trade just and harga turun dan memperoleh alternatif pembiayaan dengan resi gudang yang diterbitkan sebagai agunan di bank. Selain itu, dalam SRG barang yang disimpan di gudang akan terjamin standar mutunya.

Melalui SRG, akan terpantau ketersediaan dan sebaran komoditas khususnya bahan pangan yang disimpan di gudang SRG. Hal ini dapat membantu pemerintah mengambil kebijakan yang diperlukan, seperti distribusi dari daerah surplus ke daerah minus. Saat ini, nilai resi gudang yang diterbitkan tercatat Rp788,4 miliar dengan pembiayaan sebesar Rp461,6 miliar periode Januari–Oktober 2023.

Didid menambahkan, terdapat 22 jenis komoditas dalam perdagangan SRG berdasarkan Permendag Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Barang dan Perawatan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang. Komoditas SRG tersebut meliputi gabah, beras, jagung, kopi, kakao, gula, karet, rumput laut, rami, gandum, gambir, teh, kelapa, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, kedelai, tembakau, dan kayu manis.

Nilai Transaksi PLK Capai Rp43,85 Miliar dan Instrumen PLK akan Diperkuat

Kepala Bappebti mengaktifkan pasarterbuka daerah dan Kementerian/lembaga terkait untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan ekosistem PLK. Langkah ini dilakukan untuk memfasilitasi kewilayahan PLK sebagai salah satu instrumen perdagangan berjangka komoditas yang akan mengangkat unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PLK merupakan pasar fisik komoditas yang terorganisasi bagi pelaku usaha untuk bertransaksi melalui sistem lelang. Alanya PLK akan mewujudkan perdagangan yang transparan, adil, akuntabel, dan stabilisasi harga. Selain itu, PLK juga dapat menjadi akses pasar untuk komoditas yang disimpan di gudang SRG.

"Salah satu indikator yang mempengaruhi perkembangan dan pemanfaatan PLK adalah penguatan sistem regulasi. Di antara instrumen PLK, sangat dibutuhkan untuk mendukung harga yang adil dan transparan bagi petani, nelayan, peternak dan masyarakat kecil serta membebaskan industri di dalam negeri. Untuk itu, perlu diperkuat mekanisme perdagangan berjangka kompositif serta memberikan perlindungan masyarakat," jelas Didid.

Adanya Peraturan Presiden No 78 Tahun 2023 tentang Petanian, Pembiayaan, dan Pengembangan PLK merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam melakukan penguatan kebijakan dan menjadi dasar pengembangan PLK.

"Kementerian Perdagangan diamanatkan untuk menyusun peraturan turunan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2022 tentang Petanian, Pembiayaan, dan Pengembangan PLK melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Permendag akan mengatur Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) dan substansi teknis implementasi PLK, sebagaimana teruang dalam Perpres tersebut, dan saat ini sudah berproses," ujar Didid.

Rancangan Permendag PLK akan mengatur beberapa hal. Pertama, pasar lelang per dag, forward yang melibatkan banyak penjual dan pembeli sebagai peserta lelang. Kedua, perdagangan lelang komoditas harus mendapatkan izin dari Bappebti. Ketiga, Bappebti mengawasi pelaksanaan lelang komoditas di Indonesia.

Konsep, komoditas yang ditransaksikan melalui PLK harus memiliki standar mutu, kualitas, dalam sertifikasinya, PLK akan diintegrasikan dengan SRG sebagai akses pasar komoditas yang disimpan di gudang SRG. Kedua, komoditas yang ditransaksikan melalui PLK akan diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan berdasarkan masukan dari PLK, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Menurut Didid, nilai transaksi PLK pada Januari s.d Oktober 2023 mencapai Rp43,8 miliar. Transaksi PLK ini mencakup komoditas karet, kopi, beras, dan komoditi pertanian lainnya.

Penilaian Berkala Pialang Berjangka Komoditi

Bappebti menerapkan sistem penilaian berkala (mtng) pialang berjangka komoditi setiap tiga bulan. Pada 15 Juli 2023 lalu, Bappebti telah menyimpulkan hasil penilaian berkala pialang berjangka komoditi pada periode Januari–April 2023 pada situs web Bappebti. Hal ini berkaitan dengan masih banyaknya permasalahan dan pedagang terkait SPA.

Penilaian berkala pialang berjangka dilakukan berdasarkan pada tiga indikator/parameter: yaitu kinerja pialang berjangka, penilaian masyarakat, dan nilai program. Itu dalam penyusunan penilaian berkala bersumber dari pelaporan pialang berjangka ke Bappebti, meliputi laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan transaksi, dan penilaian implementasi dari Pwercin Lelang dan Penetapan Pendidikan Terorisme (APU PPT). Upaya penguatan pedagang dan penilaian nasabah juga menjadi pertimbangan dalam penilaian berkala pialang berjangka.

Didid mengatakan, penilaian berkala tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas, kinerja, dan motivasi para pialang berjangka komoditi dalam melakukan usaha di bidang PFK sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. "Penilaian berkala juga bertujuan agar masyarakat semakin percaya dan terlindungi dalam bertransaksi di bidang PFK melalui pialang berjangka dengan rating yang baik," tutup Didid.